PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Nisa Munisa

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email : nisaa.munisaa@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, S.H, M.H,

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email : pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Advokat merupakan suatu profesi terhormat yang memiliki kedudukan sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan berperan penting didalam penegakan hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Akan tetapi, peran penting yang dimiliki oleh advokat tercemari oleh pelanggaran kode etik advokat yang cukup meresahkan. Ada 25% kasus yang didampangi oleh advokat telah terjadi pelanggaran kode etik advokat. Sedangkan di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur terdapat 62 kasus pelanggaran kode etik advokat sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Juli 2017. Permasalahannya adalah pada terjadinya pelanggaran etika profesi yang dimiliki oleh advokat meski telah terdapat Undang – undang yang mengatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum pada Pasal 4 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat terhadap tindakan pelanggaran kode etik advokat dan untuk menganalisis mengenai hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran kode etik profesi advokat. Metode penelitian menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan advokat sebagai pengadu dan korban serta anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan efektif pada sebelum dan saat proses persidangan. Yaitu berdasar pemenuhan atas pasal 4 Ayat (2) juncto pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh penegakan hukum Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dengan landasan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadil Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Sedangkan pada proses penegakan hukum yang tidak berjalan dan menjadi permasalahan adalah pada proses pelaksanaan putusan in kracht yang belum dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai akhir tahun 2016. Mengenai hambatan – hambatan dalam penegakan hukum Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ialah sarana atau fasilitas yang kurang, waktu, terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan masyarakat, kerja sama antara PERADI dengan Mahkamah Agung dan Biaya Perkara.

Kata kunci : penegakan hukum, pelanggaran kode etik profesi, advokat

Abstract

Advocate is an honorable profession which has the same position as other law enforcement officers and plays an important role in law enforcement as stated in Article 5 Paragraph (1) of Law Number 18 Year 2003 About Advocate. However, the important role that advocates have is polluted by the violation of the advocate code of ethics is quite disturbing. There are 25% of cases accompanied by advocates has violated the code of ethics advocate. While in the Regional Honor Board PERADI East Java there are 62 cases of violation of the code of ethics advocate from March 2010 to July 2017. The problem is on the occurrence of violations of professional ethics owned by advocates despite the existing laws that regulate. The purpose of this study is to analyze and describe law enforcement in Article 4 Paragraph (2) Juncto Article 6 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates concerning violation of profession of advocate code of conduct against violation of advocate code of ethics and to analyze the obstacles that arise in the implementation of law enforcement against the act of violation of professional code of advocate. The research method used research with the type of research law Juridical Sociologist. Data were analyzed descriptively and using qualitative approach. Data were collected by interviews with advocates as complainants and victims and members of the Regional PERADI Regional Council of East Java. The results show that law enforcement has been effective in both before and during the trial process. That is based on the fulfillment of Article 4 Paragraph (2) juncto article 6 of Law No. 18 of 2003 on Advocate by law enforcement of Regional Council of PERADI of East Java based on the Decree of the Honorary Council of the Center of Indonesian Advocates Association Number 2 of 2007 on the Procedure of Examining and Courts Violation of the Indonesian Advocate Code of Conduct. While in the process of

law enforcement that does not work and become a problem is on the process of execution of a decision in kracht that has not been implemented since 2010 until the end of 2016. Regarding obstacles in law enforcement Article 4 Paragraph (2) juncto Article 6 of Law Number 18 In 2003 About Advocates are facilities or facilities lacking, time, limited information and / or community knowledge, cooperation between PERADI with Supreme Court and Case Cost.

Keywords: Law Enforcement, Violation of the Code of Professional Ethics, Advocates

PENDAHULUAN

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum, dalam arti yang sebenarnya, pertama – tama dan terutama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum, meskipun soal tercapai tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung jawab baik warga masyarakat secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan (E, Sumaryono, 2002: 17). Hukum dibuat dan diberlakukan bukan semata – mata demi keuntungan seorang pribadi individual, melainkan demi keuntungan umum semua warga negara. Dunia hukum merupakan sebuah tempat dimana setiap individu dan atau masyarakat mencari dan memperoleh sebuah keadilan dan juga kebenaran. Setiap individu dan atau masyarakat yang hendak mendapatkan keadilan akan mencari didalam dunia hukum. Didalam dunia hukum terdapat organ – organ penegak hukum yang dimana biasa disebut dengan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang akan selalu berpihak kepada masyarakat dan selalu bertujuan untuk melindungi dan serta membela hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap individu maupun kelompok didalam masyarakat saat dalam mencari dan atau memperoleh keadilan adalah Pengacara atau Advokat. Setiap negara didunia pasti memiliki sebuah lembaga dan atau perkumpulan yang biasa disebut juga dengan organisasi yang dimana menyediakan pendampingan hukum dan atau pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang sedang berperkara baik yang melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Organisasi pendampingan hukum tersebut berisi perkumpulan profesi yang dimana biasa disebut dengan Pengacara dan Atau Advokat. Hal ini Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

Advokat merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki organisasi yang dinaungi oleh sebuah profesi. Advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan aparat – aparat penegak hukum lain, seperti Hakim dan jaksa. Persamaan kedudukan Advokat dengan para aparat penegak hukum lainnya sendiri telah tercantum

didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hal ini berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan per Undang – undangan”.

Profesi advokat dan atau Pengacara sangat dibutuhkan kehadirannya oleh individu dan atau masyarakat luas. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Masih sangat dibutuhkannya profesi advokat oleh individu dan atau masyarakat umum dapat dibuktikan dengan jumlah permintaan klien didampingi oleh seorang Advokat dalam penyelesaian kasus – kasusnya. Seperti data yang diperoleh dari laman berita website kompas.com, dimana peran dari para advokat dan atau pengacara ber ragam. Masih terdapat banyak kasus dimana tersangka dan atau korban meminta bantuan seorang profesi advokat, akan tetapi terdapat pelanggaran Etika yang justru dilakukan oleh para advokat yang mendampingi klien nya tersebut.

Data yang diperoleh menyatakan bahwa 28 jumlah Advokat dan atau Pengacara yang mendampingi penyelesaian perkara tersebut ternyata 7 Advokat dan atau Pengacara telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Advokat. Apabila dipresentasikan kedalam nilai presentasi, maka hasil nilai yang diperoleh adalah profesi Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi adalah 25% dari nilai presentasi 100%. Nilai presentasi ini terbilang cukup besar mengingat begitu banyak nya profesi Adokat yang terjun kedalam dunia hukum dan citra dari para profesi advokat sendiri harus dijaga nama baik dan kehormatannya.

Data tersebut adalah data mengenai kasus pelanggaran moral dan etika profesi advokat dan merupakan contoh belum ditegakkannya dengan baik Pasal 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pelanggaran moral dan etika profesi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat (2) yang mengatur mengenai adanya sumpah jabatan dan Pasal 6 yang mengatur mengenai tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh advokat. Dimana kedua peraturan tersebut merupakan dasar dari adanya etika profesi oleh advokat.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan (Kode Etik Advokat Indonesia Tertanggal 23 Mei 2002). Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat (Rosdalina, Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015 : Peran Adokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama). Adanya pelanggaran – pelanggaran kode etik profesi advokat tersebut mencoreng dan membuat rusak bentuk profesi terhormat yang dimiliki oleh advokat.

Perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) sebagai tempat penelitian pada dasarnya merupakan sebuah organisasi advokat yang besar dibandingkan dengan organisasi advokat yang lainnya diwilayah Negara Republik Indonesia yaitu dengan jumlah anggota sebanyak 16.257 advokat yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PERADI sendiri tersebar dan berada diseluruh wilayah Indonesia yang dimana terdapat 65 DPC (www.nasional.kompas.com). Persebaran DPC PERADI yang tersebar di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kasus pelanggaran kode etik profesi oleh Advokat sendiri, khususnya dalam keanggotaan organisasi PERADI telah terjadi dengan cukup banyak. Berdasarkan data yang telah dimiliki oleh peneliti yang didapatkan langsung dari Dewan Kehormatan PERADI Jawa Timur maka dapat dinyatakan dengan pasti bahwa sejak dalam kurun waktu pada bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang yaitu bulan April 2017 maka diketahui telah terjadi kasus pelanggaran kode etik Profesi Advokat yaitu sebanyak 62 perkara. 1 kasus masih dalam pemrosesan persidangan dan 61 kasus diantaranya telah selesai dengan berbagai macam putusan.

Berdasarkan dari fakta inilah terlihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak terjadi kasus pelanggaran kode etik profesi advokat yang seharusnya tidak dilakukan karena advokat merupakan profesi yang terhormat. Sehingga berdasar hal inilah kemudian menjadi sangat penting (*urgent*) nya agar dilakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun

2003 Tentang Advokat agar dapat menghilangkan pelanggaran yang terjadi. Rumusan masalah yang kemudian muncul adalah diantaranya : Bagaimana penegakan hukum Pasal 4 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai pelanggaran kode etik profesi Advokat dan Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran kode etik profesi Advokat. Rencana pemecahan masalah yaitu dengan melakukan proses penelitian dengan mencari data dan wawancara untuk mendapat informasi sebenarnya yang kemudian akan dianalisis dan ditarik hasik serta simpulan.

Tujuan penelitian yaitu Untuk mendiskripsikan dan menganalisis penegakan hukum Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap tindakan pelanggaran kode etik profesi Advokat dan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai hambatan – hambatan yang timbul dan menyebabkan Pasal 4 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada khususnya tidak dapat ditegakkan sehingga terjadi pelanggaran kode etik profesi Advokat secara berkelanjutan dan terus – menerus. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya profesi advokat untuk memperbaiki tingkah lakunya dalam menjalankan profesi advokatnya tanpa melakukan perbuatan melanggar etika profesi advokat serta tetap menjaga nilai moral diri.

Kajian teoritik yang digunakan yaitu mengenai pertanggungjawaban, tinjauan umum tentang advokat, tinjauan mengenai sumpah jabatan, tinjauan mengenai etika profesi hukum, tinjauan umum mengenai kode etik profesi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika profesi. Penelitian ini menggunakan teroi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor – faktor yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri (Undang – undang), faktor penegak hukum yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 80).

METODE

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis (Hukum

Empiris) yakni menggunakan studi kasus hukum empiris yaitu berupa kasus pelanggaran hukum yang tengah terjadi didalam tengah kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 40). Gejala sosial yang dimaksud adalah mengenai fakta bahwa semakin banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang profesi khususnya profesi advokat yang tidak ada hentinya. Padahal telah dengan jelas betapa penting nya kode etik profesi bagi setiap individu profesi advokat.. Berdasarkan hal inilah diperlukan sebuah penanganan yang serius untuk memberantasnya melalui penegakan hukum Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, terutama terhadap pasal 4 juncto pasal 6.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian Kualitatif yang merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 192).

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kesekretariatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) se Jawa Timur dimana merupakan wilayah hukum dari kasus – kasus pelanggaran kode etik profesi advokat se lingkup Jawa Timur. Pemilihan Lokasi Penelitian oleh peneliti ini didasarkan kepada fakta bahwa PERADI merupakan organisasi profesi Advokat besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERADI merupakan organisasi profesi Advokat yang menerima amanah langsung dari Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga PERADI memiliki legalitas, wewenang, dan lain – lain. Dapat dikatakan bahwa organisasi lain selain dari PERADI tidak memiliki legalitas sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Advokat. PERADI merupakan organisasi yang terbentuk oleh KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang didalamnya terdiri dari 8 organisasi advokat lain di Indonesia. 8 organisasi Advokat Indonesia tersebut yang sah diantaranya adalah IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), dan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). Sehingga terjadi penggabungan dari seluruh organisasi advokat di wilayah Indonesia. selain itu,

PERADI merupakan organisasi Advokat Indonesia yang paling berusaha keras dalam menjaga nama dan atau profesi terhormatnya.

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya serta khususnya advokat yang menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Selain itu peneliti juga mengambil data melalui informan lain yaitu masyarakat yang dirugikan dengan adanya pelanggaran kode etik profesi Advokat yang dalam hal ini adalah korban dari pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh advokat.

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan advokat dan pegawai yang memiliki jabatan didalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya dan Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur dengan memberikan pertanyaan lisan serta diskusi yang dilakukan didalam proses wawancara Selain itu untuk mendapatkan data yang terbentuk dalam dokumen maka peneliti melakukan pengajuan permohonan secara tertulis guna mendapat dokumen yang diinginkan. Peneliti memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan, mencermati peraturan per Undang – undangan yang bersangkutan, membaca jurnal – jurnal hukum maupun artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari website dan laman yang ada di website yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan sebuah metode pendekatan Kualitatif. Yaitu Prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia serta memiliki landasan berupa menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Holistik) (Burhan Ashshofa, 2004 : 15).

Metode dasar dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan Diantaranya meliputi jumlah perkara pelanggaran kode etik profesi advokat yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian diolah oleh peneliti sendiri dalam bentuk tabel, Jumlah perkara pelanggaran kode etik profesi advokat yang terjadi di wilayah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) wilayah Jawa Timur, Gambaran alur proses penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi yang menaungi mereka. jika dalam penelitian ini maka

menggunakan organisasi PERADI, Dokumen – dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk metode wawancara sendiri dilakukan dengan mewawancarai informan secara langsung dan runtut mengenai segala suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi advokat.

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah – langkah berupa mereduksi data dari awal sampai akhir. Langkah mereduksi ini memiliki maksud yaitu peneliti akan memilih informasi yang telah didapatkan dalam segi mana saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Tahap yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah penyajian. setelah pemilihan atau penyaringan informasi telah selesai dikerjakan dan sudah terbentuk dalam hasil baik berbentuk tabel maupun uraian penjelasan. Tahap terakhir yang akan peneliti lakukan adalah menganalisis data yang pada akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian dan peneliti pada akhir dari laporan penelitian akan memberikan saran mengenai permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif analitis karena data yang diambil merupakan data yang meliputi isi dan struktur hukum positif. Teknik ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Zainuddin Ali, 2014 : 107).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keorganisasian PERADI

Peradi merupakan organisasi advokat yang dibentuk oleh KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang pada dasarnya merupakan perkumpulan dan atau himpunan dari 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia, diantaranya : IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), dan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). Peradi merupakan organisasi mandiri dan telah memiliki Dewan Kehormatan sendiri untuk memproses dan mengadili advokat yang menjadi anggotanya. Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI memiliki 93 Dewan Pimpinan Cabang yang telah tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di setiap daerah terdapat Dewan

Kehormatan yang menangani berbagai bentuk pelanggaran kode etik profesi advokat dari setiap advokat yang menjadi anggota PERADI dalam setiap perwakilan cabang daerah yaitu terletak di setiap wilayah provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian yang dimiliki oleh PERADI tidak membuat para advokat yang menjadi anggota didalamnya patuh dan menaati setiap aturan yang ada. Masih terjadi tindakan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan dan akhirnya dapat merusak profesi terhormat advokat. Jumlah perkara pengaduan di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur sendiri dari bulan Maret 2010 sampai dengan Januari 2017 yang bertotal 62 dan 1 kasus diantaranya masih sedang dalam proses penyelesaian.

Hasil Wawancara Dengan Anggota Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur

Wawancara yang dilakukan dengan Anggota Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur terdiri dari anggota Majelis Dewan Kehormatan tetap dan anggota Majelis Dewan Kehormatan ad hoc.

Anggota majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur Bapak Soewito, S.H menjelaskan bahwa Suatu organisasi pasti memiliki pengurus yang memegang peran penting didalamnya sebagai eksekutif. Keorganisasian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sendiri memiliki kepengurusan eksekutif yang diperankan oleh Dewan Kehormatan baik di tingkat Daerah maupun pusat. Proses beracara PERADI diatur dengan SK Dewan Kehormatan PERADI Pusat Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Advokat Indonesia. setiap majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI dalam melaksanakan persidangan kode etik advokat berpedoman pada SK tersebut. Setiap proses pendaftaran dan penanganan perkara pelanggaran kode etik profesi advokat dilakukan dari adanya pengaduan oleh advokat. Pengaduan yang dilakukan oleh pengadu diproses di Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI. Setelah pengaduan masuk teradu diberikan dan/atau dikirimkan surat pemberitahuan dan harus sudah memberikan jawaban dalam tenggang waktu selama 14 hari. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari pihak teradu tidak memberi jawaban dan/atau tanggapan maka pihak teradu akan diberikan surat pemberitahuan yang kedua. Pihak teradu dapat menyampaikan jawaban secara tertulis. Apabila setelah 2 kali diberikan surat pemberitahuan tetap tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi maka akan langsung dilakukan persidangan dan tetap melakukan relas panggilan kepada teradu.

Setelah pengaduan teregister maka sekertaris Dewan Kehormatan Daerah yang juga berperan sebagai panitera didalam persidangan akan mengajukan dan memberikan pengaduan tersebut kepada Ketua Dewan

Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Berkas tersebut akan diperiksa dan akan dilakukan penunjukan majelis Dewan Kehormatan Daerah yang beranggotakan 5 orang yang penunjukan tugasnya merupakan wewenang mutlak Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Akan tetapi, atas persetujuan Ketua Dewan bisa dilakukan oleh Kesekretariatan. Setelah penunjukan majelis dewan kehormatan telah disahkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur maka majelis yang ditunjuk tersebut akan dikonfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melakukan persidangan.

Bentuk konfirmasi yang biasa dilakukan adalah melalui kontak via telepon. Penentuan hari persidangan sendiri disepakati oleh setiap Majelis Dewan Kehormatan Daerah melalui komunikasi Via telpon yang akan disepakati dan dikunci serta ditetapkan hari pertama persidangan oleh Ketua majelis Dewan Kehormatan Daerah. Tahap persidangan pertama berisi sesi tanya jawab antara Majelis Dewan Kehormatan Daerah dengan pihak pengadu baik mengenai kejelasan perkara yang telah tercantum didalam materi aduan maupun yang belum tercantum di materi aduan. Seluruh perkataan yang terdapat didalam persidangan dicatat oleh panitera pengganti dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan. saat pemberian pernyataan dalam sesi tanya jawab dirasa kurang cukup, maka diberikan sesi tambahan tanya jawab dari kedua belah pihak.

Tahap persidangan berikutnya adalah pembuktian. Bukti yang digunakan didalam sidang pelanggaran kode etik profesi advokat adalah bukti tertulis dan bukti tidak tertulis. Masing - masing bukti dari kedua belah pihak baik yang tertulis maupun tidak tertulis harus dimasukkan kedalam daftar bukti dan saksi. Tahap pemeriksaan bukti diawali dengan pemeriksaan bukti tertulis yaitu dokumen - dokumen maupun surat yang berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan bukti tertulis dilakukan dengan metode mencocokkan bukti salinan dengan aslinya yang dilakukan oleh ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah dengan dibantu anggota majelis Dewan. Pencocokan bukti tertulis yang telah dinyatakan sesuai dan sah berdasarkan aslinya akan diberikan tanda - tangan oleh Ketua majelis Dewan kehormatan daerah beserta tanggal ditanda tangani.

Tahap pembuktian selanjutnya adalah proses pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi dilakukan dengan metode bergantian. Satu persatu saksi diperiksa dalam 1 ruangan secara bergantian. Disaat seorang saksi diperiksa maka saksi yang lain diperintahkan untuk menunggu diluar ruang sidang. Seorang saksi didalam persidangan pelanggaran kode etik profesi advokat tidak disumpah dan dapat berasal dari pihak keluarganya. Seluruh anggota maejlis dewan kehormatan dalam persidangan

memberikan pertanyaan secara bergantian dengan pengadu kemudian teradu. Saksi yang diperiksa adalah saksi dari pihak pengadu terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pihak teradu. Apabila tidak ada bukti serta saksi tambahan maka masing - masing pihak baik dari teradu maupun pengadu akan diminta untuk membuat kesimpulan yang tidak harus disampaikan dalam persidangan dan diberikan tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bersama. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak memberikan kesimpulan, maka tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Hanya saja pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan akan kehilangan hak untuk membela diri.

Kesimpulan diserahkan kepada Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur yang kemudian diserahkan kepada setiap majelis dewan kehormatan. Kemudian dilakukan musyawarah tertutup dengan panitera untuk menentukan terbukti bersalah atau tidaknya teradu berdasarkan dengan bukti. Pada akhir musyawarah maka akan dilakukan voting bersama untuk pengambilan putusan bersalah atau tidak serta vonis yang diberikan berdasar pendapat yang dilandasi alasan yang kuat. Setelah tersepakati maka akan membuat susunan putusan yang dapat ditugaskan kepada sekretaris/ panitera. Tahap persidangan terakhir yaitu pembacaan putusan dibuka dan ditutup oleh Ketua majelis Dewan Kehormatan Daerah. Setelah pembacaan putusan para pihak akan diberi tahu mengenai adanya upaya banding di Dewan Kehormatan Pusat PERADI dengan tenggang waktu pendaftaran banding selama maksimal 14 hari sejak putusan diucapkan.

Jenis vonis yang diberikan kepada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat dan telah disidang dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur berdasarkan kepada ketentuan yang tercantum didalam Kode Etik Profesi Advokat yang disahkan pada Tanggal 23 Mei Tahun 2002. Selain itu PERADI serta para majelis Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur sendiri dalam menetapkan putusan yang akan dijatuhkan, memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kemudian akan didiskusikan bersama dengan anggota majelis lainnya yang berjumlah 5 Anggota. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur sendiri telah sesuai dengan yang diatur didalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Apabila terdapat para pihak yang langsung menyatakan banding pada saat itu juga maka akan dicatat oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah. Dimana pihak yang menyatakan banding harus menyerahkan memori banding kepada Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dengan membayar biaya pendaftaran perkara dengan waktu

maksimal 14 hari. Kemudian pihak Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur yang akan mengirimkan memori banding kepada Dewan Kehormatan Pusat apabila telah dianggap benar.

Masalah yang terdapat didalam proses penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi advokat adalah terdapat pada tidak adanya kerja sama antara pihak PERADI Pusat dengan Mahkamah Agung. Dimana eksekutor yang berwenang dalam pelaksanaan putusan selain PERADI adalah Mahkamah Agung. Dimana putusan yang telah *In Cracht* atau final akan langsung diserahkan kepada Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung setelah mendapatkan putusan tersebut akan dapat disebar ke seluruh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Akan tetap karen belum dilaksanakan maka advokat yang telah divonis bersalah tersebut tetap melakukan tugas profesinya.

Pihak PERADI sendiri dalam hal upaya preventif pada dasarnya telah memberikan himbuan dan sosialisasi kepada para advokat yang menjadi anggota nya. Pembekalan ini diberikan pada saat pra jabatan atau saat sebelum pengambilan sumpah jabatan dan telah diberikan pada saat pendidikan Advokat. PERADI sering mengadakan diskusi secara berkala, akan tetapi hanya diwilayah tertentu saja. Sedangkan PERADI Pusat terkadang melakukan penataran dan/atau penyuluhan yang tidak terjadwal waktunya. Penyebab advokat melakukan pelanggaran menurutnya adalah dikarenakan adanya keinginan tertentu yang tidak ada habisnya, sehingga advokat tersebut menjadi lupa terhadap profesi mulia yang dimilikinya dan menjadi serakah yang tidak terbatas.

Hambatan utama dalam banyaknya angka pelanggaran kode etik profesi advokat adalah bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan Dewan Kehormatan. Sehingga hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan saat mengetahui terdapat pelanggaran kode etik profesi advokat. Selain itu rentang waktu pemberitahuan sidang dan hari H pelaksanaan sidang yang terlalu mendadak serta karena tidak adanya kantor tersendiri bagi anggota majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur.

Anggota majelis Ad Hoc Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur Bapak Dr. Soetanto Soepiadhya, S.H, M.H menerangkan bahwa Pelaksanaan Sidang pelanggaran kode etik profesi advokat di Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 Hakim Tetap yaitu majelis hakim yang masih aktif dalam beracara dan memiliki izin advokat serta 2 Hakim Ad Hoc yaitu majelis hakim yang berprofesi diluar Advokat. Pemilihan majelis Ad Hoc Dewan Kehormatan Daerah ini

berdasarkan dari latar belakang profesi dan prestasi yang telah diraih. Kemudian ditetapkan berdasarkan SK (Surat Keputusan) PERADI Pusat. Pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik profesi advokat di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dilaksanakan dalam setiap hari jumat dan seluruh rangkaian proses persidangan harus selesai dalam jangka waktu 3 bulan.

Pemberian sanksi kepada advokat pelanggar kode etik profesi dilakukan dengan memperhitungkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan serta hal – hal yang memberatkan maupun meringankan. Dalam pemberian sanksi tersebut terdiri dari 3 tingkatan, diantaranya sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Pelanggaran kode etik profesi advokat PERADI yang sering dilakukan adalah Melakukan tindakan berupa makelar tanah, Melewatkan jangka waktu tempo yang merupakan perbuatan fatal seorang advokat, Melakukan penyegelan rumah yang bukan merupakan kewenangan yang dimiliki advokat.

Proses beracara dalam sidang pelanggaran kode etik profesi advokat Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jawa Timur sama dengan proses beracara di sidang lainnya. Perbedaannya adalah terletak pada advokat dan/atau pendamping yang mendampingi baik pihak pengadu maupun teradu tidak diperbolehkan untuk bersuara mewakili pihak yang didampinginya selama persidangan berlangsung. Sehingga, dari hal tersebut terlihat jelas bahwa pihak terkait harus beracara secara langsung dan tidak dapat diwakilkan. Advokat dan/atau pendamping dari segala pihak bersifat pasif.

Beliau berpendapat bahwa seharusnya Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dapat bekerja sama secara baik dengan Mahkamah Agung (MA). Sehingga pelaksanaan dan jalannya hukuman dapat dilakukan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan sampai dengan awal 2017 lalu belum diketahui bentuk kerja sama yang sebenarnya antara PERADI dengan MA. Penyebab penting dari adanya advokat yang tetap melakukan pelanggaran kode etik profesi adalah karena sistem yang dimiliki PERADI sendiri adalah *Multi Bar*. Apabila Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, maka sudah pasti akan dapat mendisiplinkan advokat dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat. Akan tetapi sampai saat ini tetap masih terdapat pelanggaran kode etik profesi advokat. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat belum dijalankan dengan benar. Menurutnya penyebab turun dan/atau rendahnya tingkat moral yang dimiliki oleh advokat pada sekarang

ini adalah karena adanya kemunduran – kemunduran yang menjenuhkan dan integritas yang turun.

Hasil Wawancara Dengan Pengadu/Korban dari Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat

Pengadu sesama advokat Bapak Mahfud, S.H menerangkan bahwa Pengadu telah mengadukan sebuah kasus pelanggaran kode etik profesi advokat pada tahun 2013 lalu. Dimana terdapat advokat yang merupakan anggota PERADI mencoba melakukan perbuatan pelanggaran berupa tidak menghormati teman sejawat kepada pengadu bersama dengan kliennya. Perbuatan yang dilakukan oleh teradu yang merupakan advokat tersebut kemudian diadukan kepada Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Didalam sesi tanya jawab selama persidangan Dewan Kehormatan teradu mengakui telah bersalah dan meminta maaf kepada pengadu dengan tulus. Dikarenakan teradu telah meminta maaf dengan tulus dan saat dalam suasana bulan Ramadhan membuat pengadu memaafkan perbuatan teradu. Sehingga proses sidang di Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur di cabut dan dihentikan.

Pada Saat kasus dicabut dan dihentikan, proses sidang Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur telah memasuki tahap pertama yaitu pada sidang jawab – menjawab antara dua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur adalah diantaranya materi aduan diberikan kepada teradu melalui Dewan Kehormatan Daerah PERADI, yang kemudian dijawab oleh Teradu. Setelah materi aduan dijawab oleh teradu maka dilakukan sidang.

Selama proses persidangan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur tidak ada proses mediasi. Akan tetapi majelis Dewan Kehormatan menganjurkan untuk memaafkan dan berdamai. Hal ini dikarenakan kasus tersebut merupakan kasus antar teman sejawat. Tujuan dari pengaduan yang dilakukan adalah untuk memberikan pengetahuan bahwa advokat itu tidak dapat berlaku sebebas – bebasnya. Jika masyarakat hanya diatur oleh hukum dan kesopanan, advokat diatur oleh banyak aturan yang mengikat. Dalam hal ingin memperbaiki ataupun mengubah moralitas advokat yang buruk harus melalui proses pendidikan dan pengalaman. Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan untuk menolak advokat “ Nakal” yang telah divonis melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat dan ditahan izin beracaranya. Dengan adanya Dewan Kehormatan membuat para masyarakat semakin percaya dan dapat menurunkan angka pelanggaran kode etik profesi advokat.

Pengadu sesama advokat Bapak Trimoeja D. Soerjadi, S.H menerangkan bahwa Sejak menjadi seorang advokat, telah mengadukan 2 orang advokat. Salah satu diantaranya adalah pelanggaran kode etik profesi advokat yang terjadi pada tahun 2011 yaitu terdapat advokat yang menjadi anggota PERADI telah melakukan perbuatan melecehkan dan menunjukan sikap tidak saling menghormati diantara teman sejawat. Pelanggaran etika profesi advokat yang dilakukan adalah pelanggaran pada pasal 6 huruf b Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia.

Proses selama persidangan dilakukan secara lisan dan langsung. Majelis Dewan Kehormatan Daerah Advokat dalam akhir sidang memberikan vonis sanksi berupa skorsing selama 6 bulan dan denda sebanyak Rp. 3.500.000,-. Akan tetapi, mengetahui hasil vonis yang belum dianggap memuaskan ini, pengadu melakukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat PERADI dan telah dikeluarkan putusan berupa skorsing 3 bulan. Hasil putusan banding yang menurunkan vonis hukuman tersebut membuat korban atau pengadu tersebut kecewa. Hal ini dikarenakan hukuman dikurangi padahal teradu terbukti melecehkan dan tidak menghormati teman sejawat serta perilaku dari teradu sendiri tidak sesuai dengan *officium nobile* atau profesi terhormat.

Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat PERADI merupakan putusan yang final sehingga bagi pengadu yang belum puas dengan hasil banding tidak dapat berbuat apa – apa. Alasan dari Dewan Kehormatan Pusat PERADI mengurangi hukumannya adalah karena adanya berbenturan kepentingan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan dan/atau karena adanya sifat tidak koarsial kepada pengadu dan/atau korban sendiri.

Pengadu tidak mengikuti proses pelaksanaan putusan. Dewan Pimpinan Nasional PERADI sendiri belum begitu dapat melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Daerah maupun Pusat dan belum berkoordinasi baik dengan Mahkamah Agung. Pengadu berharap PERADI Pusat dapat segera melaksanakan (eksekusi) putusan yang telah incraht sehingga dapat membuktikan kepada masyarakat pada khususnya bahwa advokat merupakan profesi terhormat.

Pengadu belum mengetahui mengenai sudah atau belumnya pihak PERADI bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Padahal jika telah melakukan perjanjian dengan Mahkamah Agung maka PERADI Pusat dapat menyerahkan putusan in kracht kepada Mahkamah Agung dan nantinya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ke seluruh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Mengenai berjalan atau tidaknya suatu putusan sidang pelanggaran kode etik profesi advokat tersebut menjadi tanggung jawab organisasi profesi advokat yaitu PERADI. Tugas dari anggota organisasi advokat tersebut hanya lah untuk memenuhi kewajiban advokat.

Pengadu sesama advokat Ibu Erny Setyanti, S.H menerangkan bahwa pernah Mengadukan suatu perbuatan pelanggaran kode etik profesi advokat yang dilakukan oleh advokat anggota organisasi PERADI pada tahun 2013. Pelanggaran berupa teradu telah berkata kotor dan bertindak tidak menghormati teman sejawat. Kemudian pengadu membuat aduan kepada Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Kemudian dilakukan registrasi dan dilakukan persidangan. Pelanggaran kode etik profesi yang diadukan adalah terhadap pelanggaran Pasal 4 Ayat (2); Pasal 6 huruf a, b, c, d, e, f; Pasal 18 Ayat (2) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Serta juga termasuk pelanggaran Pasal 5 huruf a dan b Kode Etik Advokat Indonesia.

Aduan masuk ke kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur tertanggal 9 September 2013 dan baru diputus pada tanggal 17 Januari 2014. Pengaduan disampaikan secara tertulis dan langsung kepada Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Setelah materi aduan dianggap cukup dan dapat diregister serta pihak pengadu telah membayar lunas pendaftaran perkara sebesar Rp. 3.500.000,- dan menerima format penerimaan atau tanda terima yang distempel oleh kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur.

Setelah aduan telah diterima dan di register oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur, materi aduan yang diberikan oleh Pengadu kemudian dikirimkan kepada pihak teradu beserta dengan surat pemberitahuan adanya aduan terhadapnya. Selain terdapat surat pemberitahuan juga terdapat surat pemanggilan atau relass panggilan. Akan tetapi saat pemanggilan pertama, pihak teradu tidak hadir dan kemudian dilakukan pemanggilan kedua yang tetap tidak hadir. Pihak teradu tidak menghadiri sidang pertama dan hanya mengirimkan jawaban secara tertulis melalui via pos.

Pada saat sidang pertama sesi yang dilakukan diantaranya adalah dengan dibuka oleh ketua majelis Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur yang bertugas pada persidangan kasus tersebut. Pembukaan sidang dilakukan seperti yang terdapat di Pengadilan Negeri pada umumnya. Akan tetapi, didalam persidangan kode etik tersebut tidak dibacakan mengenai tata tertib selama proses persidangan oleh majelis Dewan

kehormatan pada sidang dan majelis akan menanyakan mengenai rincian permasalahan yang terjadi.

Kemudian pihak pengadu menjelaskan mengenai rincian kasus sesuai yang dialami. Akan tetapi, dikarenakan teradu tidak hadir maka sesi sidang dilanjutkan dengan pemberitahuan mengenai pemanggilan kedua yang akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan kepada teradu. Kemudian sidang diakhiri dengan pemberitahuan kepada pengadu untuk menghadirkan saksi dan bukti saat persidangan selanjutnya. Persidangan kedua dibuka oleh ketua majelis hakim dan hanya dihadiri oleh pihak pengadu. Pihak teradu tetap tidak menghadiri sidang kedua dan sidang kedua tetap dilaksanakan. Pada persidangan tersebut pengadu mengajukan saksi dan bukti.

Sesi pemeriksaan dipersidangan kedua dimulai dengan melakukan pemeriksaan bukti tertulis yaitu dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kasus. Setelah pihak pengadu mengajukan dan menyerahkan bukti tertulis maka majelis Dewan Kehormatan Daerah mengamati bukti tertulis yang telah bermaterai tersebut dan dicocokkan dengan dokumen aslinya. Pencocokan tersebut dilakukan secara berurutan dan hanya dilakukan oleh para majelis Dewan Kehormatan Daerah dalam sidang. Setelah pemeriksaan bukti tertulis telah selesai maka sesi selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Saksi yang diajukan dipersidangan tersebut diperiksa secara terpisah dengan sistem berupa saat seorang saksi masuk dan dilakukan pemeriksaan maka saksi lainnya berada diluar ruangan. Sebelum melakukan pemeriksaan maka ketua dan anggota majelis Dewan Kehormatan Daerah memeriksa identitas saksi dan diminta salinan kartu identitasnya.

Pada proses pemeriksaan saksi di sidang Dewan Kehormatan Dearah tidak dilakukan proses penyempahan saksi. Ketua dan anggota Majelis Dewan Daerah Kehormatan didalam sidang memberikan pertanyaan secara bergantian kepada saksi yang diperiksa. Setelah semua anggota majelis Dewan Kehormatan Daerah maupun ketua sidang merasa cukup dan tidak ada pertanyaan maka pihak pengadu diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Pertanyaan dan jawaban serta semua ucapan yang dilakukan selama pemeriksaan dan persidangan dicatat oleh panitera pengganti.

Akhir sidang kedua ini ditandai dengan telah selesainya semua pemeriksaan pada bukti dan saksi. Ketua majelis Dewan Kehormaan Daerah kemudian memberitahukan mengenai sidang putusan yang akan diberikan melalui relass panggilan dan pihak pengadu mmenerima relass panggilan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan. Diberikan relass panggilan dikarenakan tanggal persidangan untuk pembacaan

putusan belum dapat ditentukan. Persidangan ketiga adalah pembacaan putusan yang dibuka oleh ketua majelis Dewan Kehormatan Daerah.

Pihak pengadu maupun teradu hadir dalam persidangan pembacaan putusan. Putusan dibacakan oleh ketua majelis Dewan Kehormatan Daerah yang kemudian diteruskan secara bergantian oleh anggota majelis. Putusan diambil berdasarkan bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pengadu memiliki nilai akurat tinggi. Setelah pembacaan putusan selesai dilakukan, ketua majelis Dewan Kehormatan Daerah memberitahukan mengenai adanya upaya – upaya banding pada Dewan Kehormatan Pusat PERADI. Pihak pengadu maupun teradu sama – sama tidak menyatakan akan banding saat persidangan tersebut. Persidangan kemudian ditutup oleh ketua majelis Dewan Kehormatan Daerah. Salinan putusan diberikan oleh Panitera Dewan Kehormatan Daerah dan dikirim melalui via pos.

Akan tetapi pihak teradu mengirimkan kontra memori banding sekaligus surat pernyataan banding tertanggal 27 Januari 2014 dan dijawab oleh pengadu dengan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2014. Proses banding tersebut kemudian diputus tertanggal 3 Mei 2016. Selama proses banding kedua belah pihak yaitu teradu dan pengadu tetap mengikuti. Isi dari vonis putusan banding yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Pusat PERADI adalah berupa pemberhentian tetap dari profesi advokat.

Putusan banding yang bersifat final tersebut telah dilaporkan kepada Mahkamah Agung di awal tahun 2017 dan kemudian dilakukan eksekusi tepatnya pada awal bulan Mei 2017. Pelaksanaan putusan tersebut diketahui oleh pihak pengadu melalui pemberitaan pada sebuah koran dan pengadu mendapat laporan dari Dewan Kehormatan PERADI Pusat yang memberitahukan mengenai pelaksanaan eksekusi.

Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat

Organisasi advokat PERADI memiliki peraturan mengenai proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat yang tertuang didalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Didalam peraturan tersebut tercantumkan mengenai proses penegakan hukum pada tingkat pertama dan tingkat kedua.

Praktik dan pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat oleh PERADI telah sesuai dengan bagan 3.2 Tentang Proses

penanganan perkara di Tingkat Pertama PERADI berdasar Keputusan DKP No. 2 Tahun 2007. Pada awal tahap pengaduan yaitu pendaftaran pengaduan dan pembayaran biaya telah diatur didalam Pasal 3 Ayat (1) Kep. DKP PERADI No.2/2007. Tahap awal dalam pengaduan tersebut didalam Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari anggota majelis kehormatan tetap maupun ad hoc Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur serta pengadu. Dimana pengadu memang secara langsung mendatangi kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur untuk membuat sebuah aduan mengenai adanya pelanggaran kode etik profesi advokat.

Adanya pengaduan yang telah masuk di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur tersebut dicatat didalam buku register penerimaan aduan. Bukti dari telah diterimanya aduan oleh pengadu tersebut adalah dengan diberikannya akta penerimaan aduan. Saat proses penerimaan aduan tersebut pengadu diharuskan untuk melakukan pembayaran biaya pengaduan sebesar Rp. 3.500.000. Setelah pembayaran biaya maka pengaduan telah dapat diregister dan diberikan format penerimaan/tanda terima yang telah distempel oleh Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Data yang diperoleh tersebut didukung dengan pernyataan dari anggota majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur, pengadu dan pihak kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur.

Tahap dalam Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan berkas perkara oleh panitera kepala yang telah tercantum didalam Pasal 4 Kep. DKP PERADI No.2/2007 mengenai keharusan dari Dewan Kehormatan Daerah untuk memeriksa berkas dan menyatakan lengkap atau tidaknya berkas perkara. Didalam Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur sendiri apabila berkas pengaduan yang diberikan oleh pengadu masih belum lengkap maka berdasar pernyataan dari kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur beserta pernyataan pengadu berkas tersebut akan diminta untuk dilengkapi kembali.

Mengenai adanya berkas telah dinyatakan lengkap maupun dinyatakan belum lengkap dan diminta untuk dilengkapi kembali tidak terdapat suatu bukti autentik tersendiri di Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Akan tetapi berdasar pernyataan dari sekretaris dan pihak pengadu sendiri dinyatakan bahwa terdapat proses pemeriksaan oleh pihak Kesekretariatan yang juga merangkap sebagai panitera dengan melibatkan pihak pengadu. Dimana

apabila berkas telah sesuai maka akan langsung dinyatakan lengkap. Akan tetapi apabila masih ada kekurangan maka pengadu akan diberitahu secara langsung untuk melengkapi kekurangan secepat mungkin. Sehingga apabila setelah dilengkapi akan bisa dinyatakan lengkap dan langsung dilimpahkan.

Tahapan selanjutnya adalah berkas perkara pengaduan yang telah dinyatakan lengkap akan dilimpahkan kepada sekretaris yang sebelumnya juga berperan sebagai panitera Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Pelimpahan berkas perkara pengaduan yang telah dilakukan tersebut menyatakan bahwa berkas telah lengkap dan dapat dilakukan tahap pembentukan Majelis Kehormatan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang dicantumkan didalam Pasal 5 Ayat (1) Kep. DKP 2/2007.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penunjukan majelis kehormatan dalam Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur seharusnya adalah dengan diadakan musyawarah dan/atau rapat seperti yang tercantum pada Pasal 14 Ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia. Akan tetapi dikarenakan waktu dan tempat yang terbatas menyebabkan proses penunjukan majelis Kehormatan Daerah dilakukan melalui via komunikasi telepon dimana sebelum itu dilakukan perundingan antara Sekretaris/Panitera Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur yang kemudian dilakukan verifikasi kepada anggota majelis yang akan ditunjuk tersebut apakah bisa menjadi majelis dalam persidangan atau tidak. Setelah majelis yang ditunjuk menyatakan kesanggupannya maka diberikan surat penetapan penunjukan majelis kehormatan oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur.

Jumlah Majelis yang ditunjuk dalam penetapan Majelis Kehormatan adalah berjumlah 5 Majelis. Diantaranya terdiri dari 3 diantaranya adalah anggota majelis tetap Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur yang berprofesi sebagai advokat dan 2 majelis kehormatan lainnya yang berasal dari bidang profesi diluar advokat sebagai anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Setelah surat penetapan dikeluarkan maka berkas perkara pengaduan akan dilimpahkan ke masing – masing Majelis Kehormatan yang telah ditunjuk tersebut. Pelimpahan berkas pengaduan tersebut dilakukan melalui via pos maupun pelimpahan secara langsung ditempat kerja.

Tahap selanjutnya adalah pengiriman surat pemberitahuan yang dilampirkan berkas perkara ke teradu setelah dinyatakan lengkap dalam waktu 14 hari berdasarkan Pasal 7 Kep. DKP 2/2007. Proses

pengiriman berkas tersebut telah sesuai dilaksanakan dalam praktik oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur serta telah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002.

Pengiriman berkas pengaduan kepada Teradu dilengkapi dengan surat pemberitahuan kepada teradu untuk memberikan jawaban dalam waktu 21 hari berdasar Pasal 8 Ayat (1) Kep. DKP 2/2007. Praktiknya Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur telah melaksanakan tahap sesuai dengan peraturan tersebut. Hal tersebut telah didukung dengan pernyataan dari anggota Majelis kehormatan dan sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Mengenai pemberitahuan kepada teradu untuk memberikan jawaban diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia yang dimana telah sesuai dengan Peraturan dan praktik di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur.

Apabila dalam jangka waktu 21 hari teradu telah mengirimkan jawabanya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan maka akan diberikan kepada pengadu saat sidang pertama dilaksanakan. Akan tetapi apabila dalam jangka waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis maka majelis kehormatan akan memberikan surat peringatan dalam hal pemeritahuan kedua kepada teradu untuk memberikan jawaban dalam waktu 14 hari berdasar Pasal 8 Ayat (3) Kep. DKP 2/2007. Dalam hal sampai jangka waktu 14 hari telah berakhir teradu tetap tidak memberikan jawaban tertulis kepada majelis kehormatan maka teradu dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Peraturan tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 Ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002.

Perkiraan batas jangka waktu penerimaan jawaban tertulis dari teradu dijadikan sebagai penetapan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 hari. Penetapan hari sidang pertama harus dilakukan panggilan secara patut selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum hari sidang pertama kepada pengadu dan teradu untuk dapat hadir di persidangan yang sudah ditetapkan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 Kep. DKP 2/2007. Proses tersebut berdasar dari hasil wawancara dengan anggota majelis kehormtan dan kesekretariatan telah dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Mengenai penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak telah diatur juga dalam Pasal 13 Ayat (5) dan (6) Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 22 Mei 2003. Adanya praktik pemanggilan para pihak dalam Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur sendiri telah sesuai dengan kedua peraturan tersebut.

Proses persidangan penyelesaian perkara harus selesai dalam jangka waktu 120 hari kerja. Apabila terdapat penyelesaian perkara yang harus membutuhkan waktu lebih lama maka dapat meminta perpanjangan waktu melalui persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Daerah. persidangan dalam perkara pelanggaran kode etik profesi advokat dimulai dengan tahap pertama yang dimana dibuka oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI. Akan tetapi saat pembukaan sidang tidak pernah dibacakan mengenai tata tertib selama persidangan. Tahap persidangan pertama berisi sesi tanya jawab antara Majelis Dewan Kehormatan Daerah dengan pihak pengadu maupun teradu baik mengenai kejelasan perkara yang telah tercantum didalam materi aduan maupun yang belum tercantum didalam materi aduan. Tahap pertama persidangan diakhiri dengan pemberitahuan kepada pengadu untuk menghadirkan saksi dan bukti saat persidangan selanjutnya.

Persidangan selanjutnya adalah pembuktian. Pemeriksaan bukti terdiri dari bukti tertulis yang berupa dokumen/surat serta dokumen tidak tertulis yaitu saksi. Daftar adanya saksi dan bukti tertulis yang dihadirkan baru diajukan pada saat persidangan tersebut secara langsung. Pemeriksaan bukti tertulis dilakukan dengan mencocokkan bukti salinan dengan aslinya oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI yang apabila telah dinyatakan sesuai dan sah berdasarkan aslinya akan diberikan tanda – tangan oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah beserta tanggal ditandatangani.

Setelah dianggap selesai maka persidangan akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi sendiri dilakukan dengan metode satu persatu saksi diperiksa dalam 1 ruangan sementara saksi lain berada diluar ruangan. Saksi dalam persidangan pelanggaran kode etik advokat tidak disumpah dan dapat berasal dari pihak keluarganya. Sebelum saksi dari masing – masing pihak diperiksa, maka dilakukan pemeriksaan identitas yang dilihat berdasarkan dari salinan kartu identitas yang diminta.

Pemeriksaan saksi dilakukan oleh seluruh pihak, baik dari Majelis Dewan Kehormatan maupun dari pihak pengadu dan teradu. Pemeriksaan diawali oleh ketua Majelis Dewan Kehormatan yang kemudian dilanjutkan oleh anggotanya. Saat saksi dari pihak pengadu yang diperiksa maka pihak pengadu yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memeriksa saksi setelah Majelis Dewan Kehormatan yang kemudian dilanjutkan oleh teradu. Hal tersebut juga berlaku bagi saksi dari pihak teradu yang diajukan.

Ketika saksi telah selesai diperiksa secara keseluruhan dan tidak ada bukti serta saksi tambahan maka masing – masing pihak baik dari teradu maupun

pengadu akan diminta untuk membuat kesimpulan yang tidak harus disampaikan didalam persidangan. Jangka waktu penyerahan kesimpulan dari para pihak disepakati bersama yang kemudian diserahkan kepada Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Setelah kesimpulan dari para pihak telah diterima maka akan dikirimkan kepada para Majelis Dewan Kehormatan yang bertugas didalam sidang.

Setelah para Majelis Dewan Kehormatan Daerah menerima kesimpulan dari para pihak maka akan langsung diadakan musyawarah tertutup bersama dengan sekretaris/panitera untuk mendiskusikan mengenai putusan yang akan diambil. Saat musyawarah dilaksanakan maka seluruh hadirin ditekankan untuk mengeluarkan pendapat dengan argumentasi kuat mereka mengenai perkara yang telah disidangkan. Para hadirin kemudian akan diberikan dissenting opinion dan melakukan voting bersama untuk pengambilan putusan bersalah/tidak terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat yang disidangkan.

Akhir dari musyawarah yang diselenggarakan adalah pembahasan mengenai jenis vonis dan berat sanksi yang akan diberikan. Kesepakatan terakhir mengenai vonis dan berat sanksi dalam putusan ditentukan oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan. Dalam pemberian sanksi tersebut terdiri dari 3 tingkatan, diantaranya sanksi ringan, sedang dan berat.

Tingkat Pemberian sanksi yang juga merupakan bentuk tindakan tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan Pemberhentian tetap dari profesinya.

Ikhtisar dari putusan yang telah disepakati bersama akan disusun oleh Sekretaris/panitera dalam persidangan. Tahap persidangan terakhir yaitu pembacaan putusan dimana mengenai hari sidang pembacaan putusannya diambil kesepakatan bersama dan/atau juga apabila belum dapat ditentukan waktu yang sesuai akan diberitahukan melalui relas panggilan sidang. Pembacaan putusan pada tahap persidangan akhir dapat dibaca secara keseluruhan maupun hanya intinya saja tergantung kesepakatan para pihak. Putusan yang telah dibacakan ditanda – tangani Majelis Kehormatan Daerah dan Panitera dan langsung diserahkan kepada para pihak apabila kedua belah pihak hadir dalam pembacaan putusan.

Salah satu pihak apabila tidak hadir dalam pembacaan putusan maka harus dilakukan penyampaian salinan putusan dalam waktu 14 hari berdasarkan yang

telah tercantum didalam Pasal 20 Ayat (6) Kep DKP 2/2007. Proses penyampaian putusan tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 17 Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002 yang menyatakan bahwa “Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada: Anggota yang diadukan/teradu, pengadu, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dan pusat dari semua organisasi profesi, Dewan Kehormatan Pusat, Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”. Praktik didalam Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur berdasar hasil wawancara dengan anggota majelis kehormatan dan pengadu telah dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada akhir sidang para pihak diberitahu mengenai adanya upaya banding di Dewan Kehormatan Pusat PERADI dengan waktu pendaftaran banding selama maksimal 14 hari sejak putusan diucapkan. Pihak yang menyatakan banding harus menyerahkan memori banding kepada Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dan membayar biaya pendaftaran perkara. Setelah persyaratan terpenuhi dan sesuai ketentuan maka Kesekretariatan akan mengirimkan memori banding kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Hal berbeda apabila terdapat para pihak yang menyatakan tidak akan mengambil langkah banding. Pernyataan para pihak yang tidak akan banding menyatakan bahwa putusan dalam suatu perkara adalah memiliki status berkekuatan hukum tetap atau pasti. Sehingga kasus perkara pengaduan pelanggaran kode etik profesi advokat dinyatakan ditutup dan berkas akan dikembalikan kepada panitera kepala. Dimana apabila di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur diserahkan ke bagian kesekretariatan yang memiliki jabatan sebagai panitera kepala.

Setelah putusan dinyatakan inkracht baik saat tahap pertama yaitu didaerah maupun tahap akhir yaitu banding maka akan langsung dilakukan pelaksanaan putusan. Eksekutor yang berwenang dalam pelaksanaan putusan adalah Dewan Pimpinan Nasional dan Mahkamah Agung. Untuk jenis sanksi ringan dilaksanakan oleh PERADI daerah secara langsung yang kemudian tetap akan diberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Nasional.

Untuk jenis sanksi ringan yaitu skorsing atau pemberhentian sementara dan sanksi berat yaitu pemberhentian tetap dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasar laporan dari Dewan Kehormatan yang kemudian berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Peran dari Mahkamah Agung

sendiri berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003. Dimulainya pelaksanaan putusan oleh MA didasarkan pada telah diteruskannya surat pemberitahuan yang dilampiri dengan putusan inkracht tersebut kepada MA oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI.

Setelah Mahkamah Agung menerima pemberitahuan untuk melaksanakan putusan inkracht dari PERADI maka Mahkamah Agung melakukan pelaksanaan putusan dengan bertindak menyebarkan dan memberitahukan mengenai adanya putusan pemberhentian advokat yang telah melanggar tersebut kepada Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya. Kemudian nantinya dari Pengadilan Tinggi akan disebarkan kembali kepada setiap Pengadilan Negeri didalam daerah yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Ayat (2) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan data yang telah diperoleh dan dianalisis diketahui bahwa proses penegakan hukum di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur pada tahap sebelum dan sesaat persidangan atau tahap administrasi telah berjalan sesuai dengan peraturan yaitu Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002. Akan tetapi, terdapat permasalahan terhadap proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat yang terletak pada proses pelaksanaan putusan inkracht. Permasalahan tersebut terletak pada belum dilaksanakannya putusan inkracht sejak pertama kali putusan kasus ada yaitu tahun 2010 akhir sampai akhir tahun 2016. Putusan baru dapat terlaksana pada rentang waktu antara akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017. Para pihak terutama pihak pengadu sendiri tidak diharuskan untuk mengikuti proses pelaksanaan putusan yang telah inkracht mengenai aduannya. Pihak pengadu hanya diberikan pemberitahuan bahwa putusan yang telah inkracht mengenai aduannya telah dilaksanakan.

Untuk menghilangkan dan/atau mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi advokat sendiri diperlukan suatu bentuk pengawasan. Didalam organisasi profesi advokat PERADI sendiri telah terdapat bentuk pengawasan yang baik dan sesuai dengan Undang – undang Advokat. Bentuk pengawasan didalam PERADI telah memenuhi unsur didalam Pasal 12 dan pasal 13 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bentuk pengawasan didalam Organisasi Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas dan penindakan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. PERADI memiliki sebuah Komisi

Pengawas yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan sekaligus sebagai penindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat. Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan PERADI telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 27 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Analisa yang telah dilaksanakan terhadap data hasil wawancara terhadap pengadu, anggota majelis kehormatan serta kesekertariat Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur sendiri mengenai proses penegakan hukum tersebut telah dikatakan sesuai dengan peraturan PERADI sendiri yaitu Keputusan DKP No. 2 Tahun 2007 yang dimana juga sesuai dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Kode Etik Profesi Advokat tertanggal 23 Mei 2002. Permasalahan dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran hukum pelanggaran kode etik profesi advokat sendiri terletak pada pelaksanaan eksekusi putusan in cracht pelanggaran kode etik profesi advokat PERADI yang belum dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Hambatan – hambatan dalam Penegakan Kode Etik Profesi Advokat

Proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat masih belum dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan baik Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun Kode Etik Profesi Advokat tanggal 23 Mei 2002. Hal tersebut dikarenakan selain terdapat permasalahan intern di PERADI sendiri juga terdapat hambatan – hambatan yang masih dirasakan baik oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur maupun dari Pengadu. Apabila hambatan – hambatan tersebut masih dibiarkan maka akan berdampak buruk dan menjadi penghalang dari penegakan kode etik profesi advokat.

Hambatan – hambatan tersebut diantaranya adalah mengenai sarana dan/atau Fasilitas yang kurang. Pada dasarnya para Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI bersifat bebas yaitu tidak memiliki kantor tetap dalam peran sebagai Dewan Kehormatan Daerah PERADI serta tidak mendapatkan bayaran selama penugasan dalam menangani setiap aduan. Sehingga hal ini tergantung dan didasarkan kepada hati nurani dan kepedulian dari masing – masing individu dalam Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jawa Timur.

Hambatan yang kedua adalah waktu. Selama proses penanganan perkara aduan pelanggaran kode etik profesi advokat para Majelis Dewan Kehormatan Daerah memiliki kendala saat rentan waktu pemberitahuan sidang dengan hari H pelaksanaan

sidang yang terlalu mendadak. Selain itu juga terdapat hambatan berupa terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan dimana Sampai saat ini setelah adanya Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan telah dibentuknya Dewan Kehormatan PERADI masih terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan Dewan Kehormatan serta tidak mengetahui mengenai arti dari keberadaan Dewan Kehormatan. Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan saat mengetahui pelanggaran kode etik profesi advokat.

Hambatan lainnya adalah kerjasama antara pihak PERADI dengan Mahkamah Agung dimana seperti yang telah dijabarkan didalam pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan putusan dilakukan antara Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Mahkamah Agung. Sejak pertama kali didirikan Dewan Kehormatan PERADI pada tahun 2010 sampai dengan akhir 2016 belum dapat dilakukan eksekusi putusan. Hal ini dikarenakan belum adanya kordinasi antara PERADI dengan Mahkamah Agung meskipun telah terdapat MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara keduanya sejak didirikan Dewan Kehormatan PERADI. Hambatan lainnya adalah pengaruh biaya yang ditetapkan saat melakukan pengaduan kepada Kesekertariat Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Selain itu juga terdapat syarat – syarat dan ketentuan lain yang dipikul pihak pengadu.

Hambatan – hambatan tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat tidak dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, faktor dari putusan Dewan Kehormatan yang tidak dapat dieksekusi dengan cepat menyebabkan advokat terus melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat. Hal yang sangat menyayangkan adalah apabila saat kasus telah selesai dan putusan telah dicapai kata in cracht tidak dilakukan pelaksanaan putusan tersebut dengan tanggap dan cepat.

Tidak dapat dilaksanakan putusan tersebut dikarenakan Dewan Pimpinan Nasional PERADI belum dapat mengirimkan permohonan pelaksanaan putusan in cracht dengan cepat kepada Mahkamah Agung karena suatu alasan intern didalam PERADI. Selain itu, faktor – faktor lain seperti menumpuknya aduan pelanggaran yang terjadi terhambat oleh masa transisi atau pergantian kepemimpinan dari Dewan Kehormatan Daerah PERADI. Padahal MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang merupakan sebuah perjanjian dan nota kesepahaman antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Mahkamah Agung (MA) sudah ada sejak dibentuknya Dewan Kehormatan

PERADI. Akan tetapi, dikarenakan suatu hal didalam PERADI yang membuat MOU antara kedua belah pihak lembaga tersebut baru dapat dilaksanakan pada saat ini yaitu pada rentang waktu antara akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017.

Meskipun demikian, terdapat berita menggembirakan bahwa setelah adanya desakan dari Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jakarta dan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur yang merupakan wilayah dengan perkara pelanggaran kode etik profesi advokat tertinggi sehingga peraturan pelaksanaan putusan incraht PERADI dibahas ulang dan membuat putusan incraht tersebut telah dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan oleh MA yang kemudian di tulis disebuah surat kabar yaitu Jawa Pos – METROPOLIS halaman bagian Kasuistika hari Sabtu tertanggal 13 Mei 2017 yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan Putusan pemberhentian tetap dari 6 Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah terbukti melakukan pelanggaran Kode etik profesi advokat.

PENUTUP

Simpulan

Proses penegakan hukum dalam tahap sebelum persidangan dan saat dilakukan persidangan yang selama ini dilakukan dan dijalankan oleh PERADI berdasar Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia kepada advokat pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik didalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun Kode Etik Profesi Advokat Tanggal 23 Mei 2002. Akan tetapi terdapat permasalahan pada proses penegakan hukum dalam tahap pelaksanaan putusan in kracht yang belum dilaksanakan maupun dieksekusi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan putusan incraht yang tidak dilakukan dengan segera menjadi salah 1 faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat tidak dapat berjalan dengan lancar yang dimana menyebabkan masih banyak terjadi perbuatan pelanggaran kode etik profesi advokat.

Penyebab lain dari tidak berjalan dengan lancarnya penegakan hukum tersebut dikarenakan terdapat faktor – faktor penghambat didalam proses penegakan hukum. Faktor – faktor penghambat tersebut diantaranya sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum sendiri terdiri dari berbagai faktor penghambat, diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri yaitu

Undang – undang, faktor dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan/atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sedangkan Faktor – faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Sarana dan/atau Fasilitas yang kurang, Waktu, Terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan masyarakat, Kerja sama antara PERADI dengan Mahkamah Agung, Biaya perkara.

Saran

Koordinasi hubungan dan komunikasi antara sesama lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah PERADI selaku organisasi advokat dan Mahkamah Agung harus dipelihara dengan baik agar pelaksanaan putusan incraht Majelis Dewan Kehormatan PERADI mengenai kasus pelanggaran kode etik profesi advokat dapat terus dilaksanakan secara efektif dan cepat. Dewan Kehormatan Daerah PERADI sendiri sebisanya juga dapat diberikan kewenangan untuk melaporkan putusan incraht secara langsung kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hambatan – hambatan dalam koordinasi antara Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Mahkamah Agung juga untuk mengefektivitasikan waktu pelaksanaan putusan. Serta perbaikan moral dari setiap advokat harus selalu dilakukan baik dari organisasi advokat sendiri maupun dari diri advokat sendiri dimana hal ini sangat diperlukan agar setiap advokat dapat menjalankan profesinya dengan benar dan sesuai dengan peraturan serta sesuai dengan hati nurani tanpa melakukan pelanggaran baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung, Penerbit Alumni.
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit
- Agus Makmurtomo dan B. Soekarno. Cetakan Pertama Tahun 1989. *Ethika (Filsafat Moral)*. Jakarta
- Ali, Zainuddin. Cetakan Kelima Tahun 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Ashshofa, Burhan. Cetakan Keempat Tahun 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- B. Taneko, Soleman. cetakan pertama Tahun 1993. *Pokok – pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Dirdjosiswono, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung. Remadja Karya CV.

- E. Sumaryono. Cetakan Kelima tahun 2002. *Etika dan Hukum*. Yogyakarta. PENERBIT KANISISUS
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Tahun 1991, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Magnis Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar Masalah – masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius
- Makmurtomo dan B. Soekarno, Agus. Cetakan Pertama Tahun 1989. *Ethika (Filsafat Moral)*. Jakarta. Wira Sari.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*. Yogyakarta. Kurnia Kalam Yogyakarta
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- S. M. Amin. 1975. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta pusat. Pradnya Paramita,
- Salam, Burhanuddin. Cetakan Pertama Tahun 1997. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Shidarta. Cetakan kedua tahun 2009. *moralitas profesi hukum*. Bandung. Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. Cetakan pertama tahun 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remadja Karya CV
- Suhrawardi K Lubis, S.H. Cetakan Kelima Tahun 2008, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika Offset
- Supriadi. Cetakan Kedua Tahun 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Ramadja Karya.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*.
- Utrecht. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung. Penerbit Universitas
- W. Poespoprodjo. Cetakan Pertama Tahun 1986. *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Remadja Karya CV

Sumber Per Undang – Undangan :

- Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, yang disahkan Pada Tanggal 22 Mei 2002

Sumber Literatur Jurnal :

Rosdalina, **Jurnal Politik Profetik** Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015 (*Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*), Institut Agama Islam Negeri Manado

Usman Pelly dan Asih Menanti. 1994. *Teori – teori Sosial Budaya*. Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Sumber literatur website :

www.kompas.com, diakses pada tanggal 4 Desember 2016

www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 4 Desember 2016

www.nasional.kompas.com, diakses pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 pada pukul 06.17 WIB.

www.peradi.or.id, diunduh pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 pukul 10.01 WIB

www.sochehsatriabangsa.wordpress.com, diakses pada tanggal 31 Juli 2017 pada pukul 10.34 WIB

www.id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 19.51 WIB